

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI 33 PROVINSI DI INDONESIA



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Yudha Wiratama Soeyanto
2015110039**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1538/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022

**BANDUNG
2022**

THE EFFECT OF FINANCIAL INCLUSION ON INCOME INEQUALITY IN 33 PROVINCES OF INDONESIA



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics**

**By
Yudha Wiratama Soeyanto
2015110039**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS**

Accredited by National Accreditation Agency No. 1538/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022

**BANDUNG
2022**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



**PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI 33 PROVINSI DI
INDONESIA**

Oleh:
Yudha Wiratama Soeyanto
2015110039

Bandung, Juli, 2022.

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D.

Pembimbing,

Dr. Miryam L. Wijaya

Ko-pembimbing,

Dr. Chandra Utama

PERYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Yudha Wiratama Soeyanto
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Maret 1997
NPM : 2015110039
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 33 Provinsi di
Indonesia

Pembimbing : Dr. Miryam Bellina Lilian Sri Kurniawati Wijaya, Dra., M.A.
Ko-pembimbing : Dr. Chandra Utama, S.E., M.M., M.Sc.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan dengan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

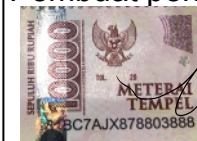
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung, 11 Agustus 2022.

Pembuat pernyataan:



Yudna wiratama Soeyanto

Abstrak

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh setiap negara. Ketimpangan dapat dilihat tidak hanya antar negara namun juga dapat dilihat antar wilayah. Peningkatan akses layanan keuangan di Indonesia telah terjadi, namun hal itu diikuti oleh peningkatan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari inklusi keuangan terhadap kesenjangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini tidak memasukkan provinsi Kalimantan Utara karena keterbatasan data. Data yang digunakan merupakan data panel tahunan dari 2016 hingga 2021 berupa indeks inklusi keuangan dan Rasio Gini yang diolah menggunakan teknik estimasi *fixed effect method* (FEM). Meskipun salah satu komponen dari indeks inklusi keuangan yaitu jumlah kantor cabang bank mengalami penurunan, indeks inklusi keuangan masih ditemukan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia. Peningkatan indeks inklusi keuangan dan turunnya jumlah kantor cabang bank dapat mengindikasikan turunnya peran jumlah kantor cabang bank dalam penyediaan layanan keuangan akibat digitalisasi.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Inklusi Keuangan, Pembangunan Sektor Keuangan

Abstract

Income inequality is a problem faced by every country. Inequality can be seen not only between countries but also between regions. There has been an increase in access to financial services in Indonesia, but it has been followed by an increase in income inequality in Indonesia. This study aims to see the extent of the influence of financial inclusion on income inequality in 33 provinces in Indonesia. This study did not include the province of North Kalimantan due to data limitations. The data used is annual panel data from 2016 to 2021 in the form of a financial inclusion index and the Gini Ratio which is processed using the fixed effect method (FEM) estimation technique. Although one component of the financial inclusion index, namely the number of bank branches, has decreased, the financial inclusion index is still found to be able to reduce income inequality in 33 provinces in Indonesia. An increase in the financial inclusion index and a decrease in the number of bank branches may indicate a decreasing role in the number of bank branches in providing financial services due to digitalization.

Keywords: Income Inequality, Financial Inclusion, Financial Sector Development.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 33 Provinsi di Indonesia”. Skripsi ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis bersedia menerima kritik dan saran untuk memperbaikinya di kemudian hari.

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, saya mendapatkan bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Nur Iwan Soeyanto dan Ibu Tinuq Widiyanti, adik-adik saya Dizza dan Andirainy, serta kepada Tante Desi yang memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Chandra Utama selaku dosen ko-pembimbing saya serta ibu Dr. Miryam B. Wijaya selaku dosen pembimbing serta dosen wali saya, atas ilmu dan arahan yang diberikan selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ivantia Savitri Mokoginta selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dari Program Studi Ekonomi Pembangunan UNPAR.

Terima kasih juga kepada Adira, Dani, Abram, Nico, Mathew, Billy, Raisa, Iman, Zeisha, Ely, Nadine, serta seluruh rekan rekan Ekonomi Pembangunan 2015 yang terus memberikan saya dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Taylor Swift dan Morissey serta David Gilmour yang memberikan dukungan dan semangat kepada saya. Terima kasih juga kepada partner saya Hasna Salma Indallah atas diskusi, dukungan dan doa yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, July 2022

Yudha Wiratama S.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.2. Tujuan Penelitian	5
1.3. Kerangka Pemikiran	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Ketimpangan Pendapatan	7
2.2. Inklusi Keuangan	8
2.3. Inklusi Keuangan dan Ketimpangan Pendapatan	10
3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	14
3.1. Metode Penelitian	14
3.2. Model Penelitian	14
3.3. Metode Estimasi	15
3.3. Objek Penelitian	16
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1. Hasil Pengolahan Data	20
4.2. Pembahasan	23
5. PENUTUP	26
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN 1: Hasil Uji Fixed Effect Model	A
LAMPIRAN 2: Hasil Uji Multikolinearitas	B
LAMPIRAN 3: Hasil Uji Hausman	C
RIWAYAT HIDUP PENULIS	E

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rasio Gini Indonesia 2007-2019	3
Grafik 2. Rata-Rata Rasio Gini di 33 Provinsi di Indonesia 2016-2021	17
Grafik 3. Rata-Rata Indeks Inklusi Keuangan 33 Provinsi 2016-2021	19
Grafik 4. Total Pertumbuhan DPK dan Kredit 2016-2021 33 Provinsi	24
Grafik 5. Total Pertumbuhan Kantor Cabang 2016-2021 di 33 Provinsi	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penelitian	14
Tabel 2. Hasil Unit Root Test Levin, Lin, Chu	20
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas	21
Tabel 4. Hasil Fixed Effect Model (FEM)	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara berupaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Masalah yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Masalah kesenjangan pendapatan tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang, namun negara maju juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduknya. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu (Musfidar, 2012).

Fenomena ketimpangan pendapatan juga dapat dilihat tidak hanya dalam suatu negara, melainkan didalam suatu daerah dalam negara. Sirojuzilam (2005) menyatakan bahwa setiap daerah memiliki sumber daya utama yang berbeda-beda. Hal ini membuat karakteristik dari tiap daerah berbeda sehingga pemerintah daerah dapat memiliki kebijakan yang unik disetiap daerahnya. Oleh karena itu, distribusi pendapatan di setiap daerah memiliki ciri yang berbeda-beda. Selain itu, dalam suatu daerah, provinsi ataupun negara bagian, terbagi menjadi wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Umumnya wilayah perkotaan memiliki sumber daya manusia yang paham teknologi, dan memiliki pendidikan yang secara umum lebih baik. Maka dari itu, suatu daerah, provinsi, maupun negara bagian juga mengalami ketimpangan pendapatan.

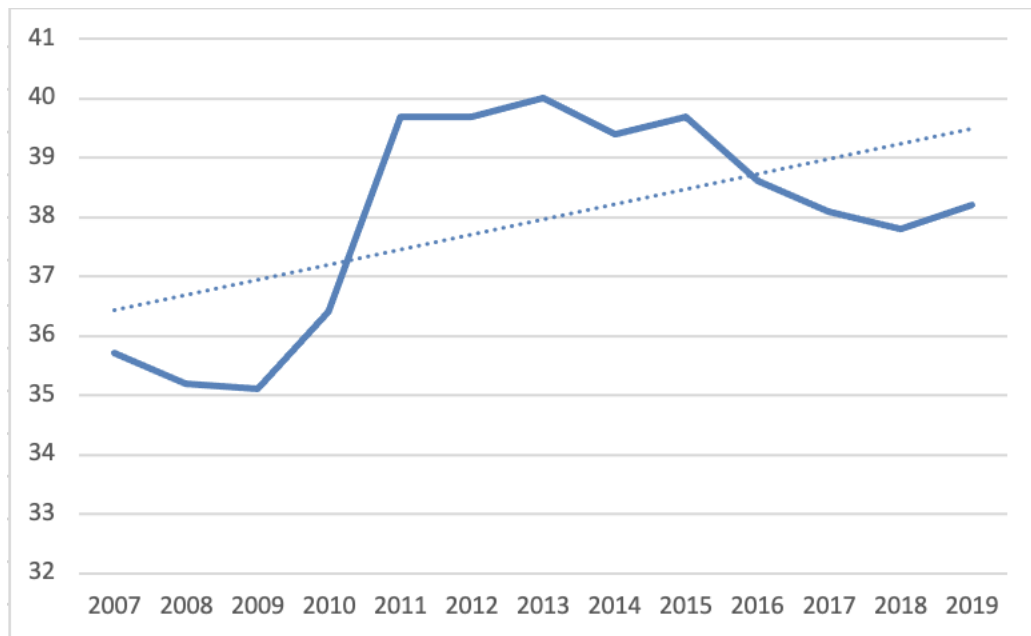
Pembangunan pada sektor keuangan dapat berimplikasi terhadap perekonomian. Demirguc-Kunt et al. (2008) menyatakan bahwa pada dasarnya sektor keuangan adalah inti dari proses

pembangunan. Selain itu Levine (1997) mengungkapkan bahwa sistem keuangan memiliki hubungan dengan pertumbuhan jangka panjang. Dengan terbangunnya sektor keuangan khususnya perbankan maka dapat membuka akses masyarakat terhadap jasa perbankan. Semakin terbukanya akses keuangan maka diharapkan pendapatan masyarakat bisa bertambah melalui kredit produktif yang tersalurkan. Menurut Allen et al. (2012) sulitnya masyarakat untuk menjangkau jasa keuangan menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha. Sehingga implikasi dari kejadian itu adalah ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat. Inklusi keuangan dipercaya dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi kesenjangan pendapatan. Berdasarkan definisi Bank Indonesia, inklusi keuangan adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat kelas bawah untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal, seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi.

Inklusi keuangan muncul sebagai topik hangat setelah *Global Financial Crisis*, terutama karena dampak krisis pada mereka yang berada di bawah piramida (penghasilan rendah dan tidak teratur, terisolasi, hidup dengan disabilitas, pekerja tidak berdokumen, komunitas kurang beruntung), yang biasanya tidak memiliki rekening bank dan banyak di negara berkembang. Secara empiris, inklusi keuangan dapat memangkas biaya keuangan, meningkatkan ketersediaan kredit dan tabungan formal, mempercepat pengembangan permodalan, bank serta stabilitas sistem keuangan. Ada banyak alasan sisi penawaran (penyedia layanan) dan sisi permintaan (konsumen) bagi mereka yang mendekam di dasar piramida untuk tetap tidak memiliki rekening bank, termasuk hambatan harga, hambatan informasi, hambatan desain produk, dan hambatan saluran. Di Indonesia sendiri penerapan inklusi keuangan merupakan tugas kolaborasi dari Bank Indonesia (BI), kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang menguasai industri keuangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor perbankan terhadap PDB yang terus meningkat setiap tahunnya. Kontribusi sektor perbankan terhadap PDB Indonesia pada tahun 2014 mencapai Rp 407 triliun dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 570 triliun (BPS, 2018). Perbankan memiliki aset terbesar dibandingkan dengan lembaga keuangan lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan perbankan merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat secara umum. Sektor perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang baik. Perkembangan ini bisa dilihat di jumlah kantor yang semakin banyak dan layanan perbankan yang semakin beragam. Menurut laporan dari Bank Indonesia (2016) dalam Statistik Sistem Keuangan Indonesia tercatat bahwa adanya peningkatan jumlah kantor cabang.

Grafik 1. Rasio Gini Indonesia 2007-2019



Sumber: World Bank (diolah).

Sejak tahun 2007 hingga 2019, ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki tren yang meningkat. Dapat dilihat pada Grafik 1, data *Gini Ratio* yang dipublikasikan oleh World Bank, pada tahun 2007 tercatat angka gini ratio sebesar 0,35 dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2008-2009. Namun pada tahun 2010-2017 menunjukkan tren angka rasio gini yang terus

meningkat hingga puncaknya mencapai angka 0,4. Hal ini juga dikonfirmasi lembaga lainnya seperti IMF dan BPS bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahunnya. Masalah ini perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendapatan yang terjadi. Karena kesenjangan pendapatan dapat berimplikasi terhadap perekonomian. Hal tersebut didukung oleh laporan World Bank (2016) yang menyimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh seperlima rumah tangga terkaya. Sementara pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih cepat ketika seperlima rumah tangga termiskin menerima lebih banyak.

Argumen utama dari hal buruk tentang ketimpangan pendapatan adalah bahwa dengan adanya ketimpangan pendapatan merupakan tanda dari adanya peluang yang berpotensi hilang untuk meningkatkan standar hidup dari mereka yang kurang beruntung. Berbagai upaya juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa ketimpangan itu sendiri merupakan penyebab masalah. Persoalan dasar dari pembangunan ekonomi tidak hanya seputar bagaimana meningkatkan PDB, tetapi juga pihak mana yang akan membuat PDB tersebut meningkat. Jika yang membuat perekonomian tumbuh merupakan masyarakat berpendapatan tinggi, besar kemungkinan akan dimanfaatkan oleh mereka, dan kemajuan melawan kemiskinan akan lambat, dan ketidaksetaraan akan memburuk. Tetapi jika pertumbuhan tersebut itu dihasilkan oleh banyak orang, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, dan buah dari pertumbuhan ekonomi dapat “dibagikan” secara lebih merata (Todaro & Smith, 2015). Dengan demikian, banyak negara berkembang yang telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi berdasarkan data historis menemukan bahwa pertumbuhan seperti itu sering kali membawa sedikit manfaat yang signifikan bagi masyarakat miskin di negara tersebut. Cingano (2012) bahkan menjelaskan dalam penelitiannya bahwa ketika ketimpangan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.

1.2. Rumusan Masalah

Menurunkan ketimpangan merupakan salah satu prioritas utama di Indonesia. Ketimpangan pendapatan yang memiliki tren meningkat sejak tahun 2007 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya membangun pertumbuhan inklusif dengan dibantu oleh keuangan yang inklusif. Inklusi Keuangan dinilai dapat memberikan manfaat yang tidak hanya dinikmati bagi individu, tetapi juga untuk menjalankan roda perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Semakin tingginya inklusi keuangan akan berdampak pada akses jasa keuangan yang lebih mudah untuk dicapai oleh masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin yang memiliki kesulitan dalam mengakses layanan jasa keuangan. Dengan begitu masyarakat miskin akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatannya. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kesenjangan pendapatan pun akan berkurang. Hal ini diperkuat oleh Sanjaya (2014) yang menyatakan bahwa pembangunan di sektor perbankan dapat mengurangi hambatan terhadap akses perbankan. Hal ini menyebabkan akses terhadap perbankan lebih mudah terutama bagi masyarakat miskin yang belum secara maksimal menggunakan atau memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal di Indonesia. Realitanya peningkatan akses layanan keuangan di Indonesia serta pembangunan sektor keuangan telah terjadi, namun hal itu diikuti oleh peningkatan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dari rasio gini Indonesia yang semakin besar, yaitu 0,37 pada tahun 2007 menjadi 0,40 pada tahun 2017.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari inklusi keuangan terhadap kesenjangan pendapatan di 33 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu melihat apakah inklusi keuangan dapat memperkecil kesenjangan pendapatan atau menimbulkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar di 33 provinsi di Indonesia. Jika hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh antara inklusi keuangan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan yang akan digambarkan oleh rasio gini, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk

melanjutkan program ini. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai masukan dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan di Indonesia.

Hasil dari penelitian dapat menjadi saran bagi pemangku kebijakan di Indonesia apabila penelitian ini berhasil menemukan pengaruh antara inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang mengkaji inklusi keuangan di Indonesia dalam lingkup daerah dan pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pembangunan di Indonesia yang selama ini berfokus di Pulau Jawa. Selain itu, belum cukup banyak penelitian yang menggambarkan inklusi keuangan melalui indeks inklusi keuangan yang dapat menggambarkan inklusi keuangan secara menyeluruh.

1.4. Kerangka Pemikiran

Inklusi keuangan dapat memengaruhi kesenjangan pendapatan melalui akses bank yang memadai, penyaluran kredit, serta layanan tabungan oleh bank. Akses dalam inklusi keuangan dapat digambarkan dengan variabel jumlah kantor cabang bank per 100.000 penduduk di setiap provinsinya. Penelitian ini juga menggunakan penyaluran kredit bank umum per PDRB masing-masing provinsi serta Dana Pihak Ketiga (DPK) per populasi penduduk untuk menggambarkan penggunaan jasa perbankan dan penetrasi perbankan di Indonesia. Ketiga indikator ini akan digabungkan menjadi Indeks Inklusi Keuangan (IIK) yang kemudian akan diukur pengaruhnya terhadap Rasio Gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran